



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**RABU, 16 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# KPK OTT Bupati BS dan Istri Muda

**KOTA MANNA, BE** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud dan istri mudanya, Heni, Selasa (15/5) sekira pukul 18.15 WIB. Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT tersebut.

Tim KPK sudah beberapa hari melakukan penindakan di wilayah hukum Bengkulu. "Empat orang sudah diamankan bersama tim. Ada kepala daerah/bupati, keluarga bupati, PNS dan pihak swasta (Pengusaha Sawit) yang diamankan serta uang sekitar Rp 100 jutaan," kata Febri.

Febri menambahkan, penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat adanya transaksi suap. "Kami melakukan kroscek informasi dari masyarakat. Diduga transaksi sudah terjadi. Sejumlah uang diamankan tim dan sedang dalam perhitungan," katanya.

Dia menambahkan, KPK juga sedang mendalami keterkaitan proyek dalam kasus tersebut. "Sedang kami dalam keterkaitan dengan proyek di daerah tersebut. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Kami masih bekerja," katanya.

Dari informasi dihimpun BE di lapangan, Dirwan ditangkap KPK di rumah pribadinya di kolam, di jalan Gerak Alam, Padang Pematang, Kota Medan, Kota Manna. OTT diduga terkait pungutan liar mutasi pejabat dan juga karena kasus dugaan pemberian fee proyek. KPK membawa Bupati BS dan istri mudanya itu menuju ke Polda Bengkulu dengan menggunakan mobil KPK sekira pukul 19.00 WIB. Selain keduanya, ada juga dua orang pria, PNS dan pengusaha sawit. Saat wawancara Bengkulu Ekspres, menyambangi rumah pribadinya, terlihat di depan rumahnya ada beberapa warga yang duduk-duduk dan ada juga sebagian yang berdiri sambil berjalan.

Tidak hanya itu ada juga beberapa anggota Polisi berpakaian lengkap dengan memegang senjata laras panjang.

Adapun beberapa orang yang ada di depan rumah bupati tidak ada yang mau dimintai keterangan. Bahkan saat ada orang datang, ada yang menjawab bupati sedang tidak ada di rumah. Sementara itu, Kapolres BS, AKBP Rudy Purnomo SIK MH membenarkan, jika Bupati BS dibawa KPK ke Polda Bengkulu. Hanya saja dirinya belum tahu penyebab bupati kena OTT oleh KPK.

"Informasi nya pak bupati kena OTT KPK, namun saya belum tahu kasus apa yang menyebabkan pak bupati ditangkap KPK," ujar Rudy.

Hingga pukul 22.16 tadi malam, Tim dari KPK yang membawa Bupati Dirwan Mahmud dan istrinya serta belum sampai ke Mapolda Bengkulu.

Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes pol Ahmad Tarmizi saat dimintai keterangan mengaku juga sedang menunggu kedatangan tim KPK dan terduga OTT. "Liat saja nanti ya, kita juga sedang menunggu," ungkapnya

**Dua Minggu Lalu KPK Beri Peringatan**

OTT terhadap Bupati BS Dirwan Mahmud ini sangat

ironis. Pasalnya, dua minggu lalu, KPK memberikan peringatan dengan melakukan sosialisasi launching E Planning dan E Perizinan, dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adliansyah M Nasution.

KPK mengingatkan pemerintahan Bengkulu Selatan (BS) agar memberikan pelayanan yang maksimal tanpa ada Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN). "Jalankalah pemerintahan yang jujur dan bersih, jika ada KKN tentu kami akan menindaklanjutinya," ujar pria yang akrab disapa Coki. Coki mengatakan, kegiatan yang rawan korupsi atau adanya aksi pungutan liar diantaranya mutasi atau rotasi jabatan. Pasalnya jika setiap tahun dilakukan rotasi dan mutasi. Hal itu patut dicurigai ada hal-hal yang kurang terpuji. "Jika setiap tahun ada mutasi itu hal aneh jangan-jangan ada praktek jual beli jabatan atau pungli," cetusnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang anggarannya paling besar, rawan korupsi. Dirinya menyebutkan ada beberapa OPD yang rawan korupsi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PU dan DPKAD.

"Khusus 5 OPD ini anggarannya paling besar dan rawan terjadi praktik korupsi, jadi berhati-hatilah mengelola anggaran," imbuhnya.

Khusus dilembaga legislatif, dirinya mengatakan ada 3 praktik yang saat ini disorotinya. Sehingga dirinya berharap agar DPRD BS tidak melakukan 3 praktik yang bisa menggiring mereka masuk ke balik jeruji besi. Ke-3 praktik kotor tersebut yakni pada saat ketuk palu, suka minta uang pengesahan atau uang ketuk palu. Kemudian pada saat kegiatan turun ke bawah melakukan penjarangan aspirasi, suka mengutamakan kegiatan untuk pribadi. Sehingga kegiatan yang dibangun menjadi milik sendiri bukan untuk masyarakat serta adanya praktek titipan proyek di OPD-OPD. "Saya minta DPRD BS jauhi tiga praktek kotor ini, jika tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Coki saat itu juga mengaku prihatin dengan Pemda BS yang selama ini selalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya siap membantu BS agar ke depan bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). "Kami siap membantu agar BS bisa meraih WTP," katanya. (369)